

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2026**





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perikanan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan



pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan;
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

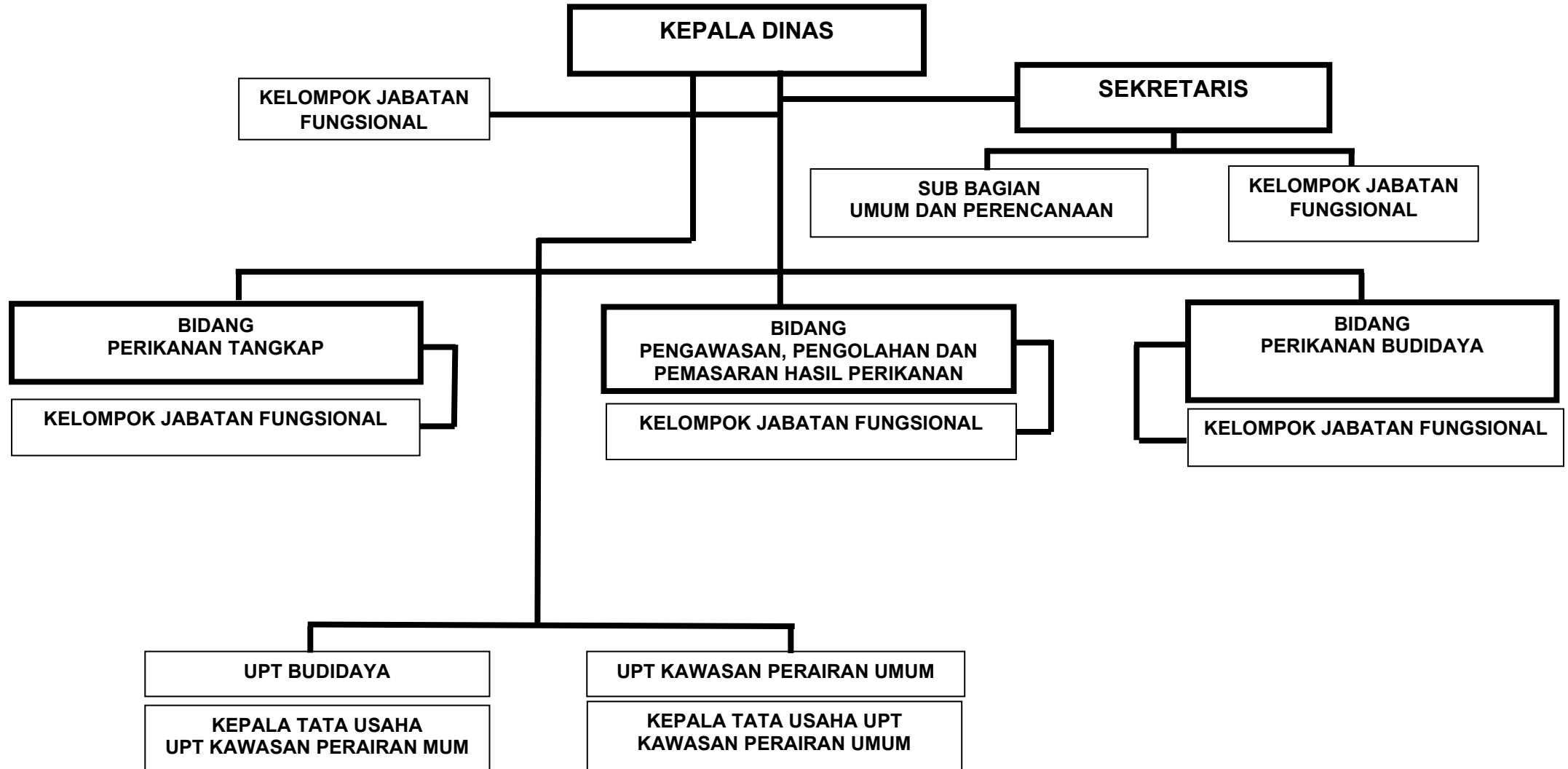


C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh KAMALUDIN, ST yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**





D. Peran Strategis Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang perikanan. Kebijakan dan strategi yang diambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan.

Peran strategis Dinas Perikanan Lampung Barat sebagai penggerak pembangunan sektor perikanan daerah antara lain melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Pembinaan serta penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaku usaha perikanan agar lebih mandiri, profesional, dan berdaya saing, serta pelaksanaan kegiatan penunjang yang meliputi perencanaan berbasis data, monitoring dan evaluasi, penguatan sistem informasi, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan mutu hasil perikanan, sehingga tercapai peningkatan produksi, nilai tambah, dan kesejahteraan masyarakat perikanan secara berkelanjutan dan akuntabel.

Potensi perikanan lahan darat di Kabupaten Lampung Barat yang dapat dikembangkan untuk budidaya kolam seluas 5.584,00 Ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 2.429 Ha, sementara untuk budidaya mina padi potensi lahan 13.710 Ha dengan tingkat pemanfaatan 452 Ha. Potensi pengembangan perikanan budidaya di darat didominasi 3 (Tiga) kecamatan, yaitu Sumberjaya, Gedung Surian dan Kebun Tebu. Potensi perairan umum di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi fokus untuk pengembangan perikanan budidaya adalah Perairan Umum Danau



Rantau dengan luas potensi 413 Ha yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung. Untuk kegiatan penangkapan ikan di perairan umum di Kabupaten Lampung Barat meliputi perairan danau, sungai, waduk, rawa dan galian air lainnya (GAL) dengan kegiatan penangkapan ikan utama berada di Kecamatan Suoh (Danau Lebar dan Danau) dan Kecamatan Lumbok Seminung (Danau Ranau). Kondisi ini menegaskan peran strategis Dinas Perikanan dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

E. Isu Strategis Dinas Perikanan

Isu-isu strategis yang perlu penanganan dan mendukung pentingnya pembangunan bidang perikanan adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas dan daya saing usaha perikanan belum optimal;
2. Pengetahuan pelaku usaha perikanan terhadap usaha pengolahan hasil perikanan masih rendah;
3. Kurangnya Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan/konservasi bidang perikanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Nomor: 523/1124/III.12/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Pj. Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat merupakan

hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Perikanan mendukung tercapainya Tujuan Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Barat yaitu *Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas* dengan indikator *Laju Pertumbuhan Ekonomi* Sedangkan sasaran strategis Pemerintah Daerah yaitu *Meningkatnya Pendapatan Perkapita* dengan indikator *Pendapatan Perkapita* Sehingga tujuan Dinas Perikanan yaitu **“Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan”** dengan indikator **“Nilai Produksi Perikanan”**.

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan selama kurun waktu jangka menengah 3 tahun sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu **“Meningkatnya Produksi Perikanan”**

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut, terdapat arah kebijakan yang ditetapkan serta strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan dan

sasaran serta target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dapat juga dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan
Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya nilai produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan- Meningkatkan sarana dan prasarana produksi perikanan- Meningkatkan penerapan teknologi produksi perikanan	Pengembangan Produksi Perikanan Yang Berkelanjutan
		<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kegiatan pengawasan sumberdaya perairan dan kegiatan konservasi sumber daya ikan- Meningkatkan motivasi konsumsi ikan masyarakat- Meningkatkan produk olahan hasil perikanan- Meningkatkan monitoring produk perikanan yang beredar di pasaran.	Peningkatan pengendalian sumber daya perikanan dan penguatan daya saing produk perikanan.
		<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusi perikanan- Meningkatkan kualitas kelompok perikanan.	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perikanan dan kelembagaan kelompok perikanan.
		<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas data di bidang perikanan.	Peningkatan sistem perencanaan perikanan.



		Meningkatkan sistem perencanaan di bidang perikanan.	
--	--	--	--

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 memiliki 5 Program, 18 Kegiatan dan 46 sub Kegiatan dengan Dana sebesar Rp.4.287.616.641,- dengan besaran anggaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.3.002.230.541,-. Rincian Program Kegiatan, Indikator Kinerja dan Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Program dan Kegiatan Pembangunan Dinas Perikanan
Kabupaten Lampung Barat

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Negara yang dipelihara
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi tangkap



Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan
Pembedayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya dan menerima bantuan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi Budidaya
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi, Pembinaan dan Pelatihan
Penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Lokasi pengelolaan pembudidayaan ikan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan dan pemasaran hasil perikanan
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna

untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	1,5%

Sumber: Dinas Perikanan Tahun 2025



NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
					SKPD UTAMA					
1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	(Jumlah produksi tahun ini - Jumlah produksi tahun lalu)/(Jumlah produksi tahun lalu) x 100	Dinas Perikanan	6%	9%	-	-	Produksi Perikanan adalah proses akhir dari aktiva ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input produksi perikanan, dapat diukur melalui produksi perikanan setiap tahun dengan menjumlahkan antara persentase produksi perikanan tangkap dan persentase produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi ikan hasil tangkapan nelayan di perairan umum darat (sungai, danau, rawa dan genangan), Produksi perikanan budidaya adalah produksi ikan konsumsi yang diusahakan melalui pembudiayaan yang berasal dari kolam, karamba dan mina padi.
1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	(Jumlah produksi tahun ini - Jumlah produksi tahun lalu)/Jumlah produksi tahun lalu) x 100	Dinas Perikanan	-	-	1,5%	1,6%	Produksi Perikanan adalah proses akhir dari aktiva ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input produksi perikanan, dapat diukur melalui produksi perikanan setiap tahun dengan menjumlahkan antara produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi ikan hasil tangkapan nelayan di perairan umum darat (sungai, danau, rawa dan genangan), Produksi perikanan budidaya adalah produksi ikan konsumsi yang diusahakan melalui pembudiayaan yang berasal dari kolam, karamba dan mina padi.



Tabel 2.5

**Analisis Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Terhadap Target Sebelumnya dan Terhadap Target Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi		
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	9,5% (dengan formulasi perhitungan sebelum perubahan formulasi baru)	1,5%	1,58%	1,6%	99%

Selanjutnya Kerangka Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025, mulai dari Plafon Anggaran Sementara, Renja Murni, APBD Murni dan Perubahan APBD dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.6

Kerangka Pendanaan

Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Kode Rekening				Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Renja Murni	APBD Murni	Perubahan APBD
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp4.735.749.297	Rp4.795.908.197	Rp4.745.873.145	Rp4.287.616.641
3	25	0	18	Dinas Perikanan				
3	25	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3.789.086.197	Rp3.788.671.197	Rp3.678.978.645	Rp3.538.713.441
3	25	1	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp75.821.000	Rp75.641.000	Rp60.612.000	Rp60.612.000
3	25	1	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.909.998.447	Rp2.909.878.447	Rp2.934.088.475	Rp3.014.237.941
3	25	01	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.390.000	Rp8.340.000	Rp8.340.000	Rp8.340.000
3	25	1	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.755.000	Rp35.740.000	Rp35.740.000	Rp19.875.000
3	25	1	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp262.869.600	Rp262.869.600	Rp172.485.600	Rp70.075.600
3	25	1	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp38.300.000	Rp38.300.000	Rp4.800.000	0
3	25	1	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp144.271.900	Rp144.221.900	Rp144.221.900	Rp146.621.900
3	25	1	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp313.680.250	Rp313.680.250	Rp318.690.670	Rp218.951.000
3	25	3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp263.000.000	Rp263.000.000	Rp282.872.000	Rp201.911.000
3	25	3	2.02	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp158.000.000	Rp158.000.000	Rp144.000.000	Rp105.510.000
3	25	3	2.03	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp105.000.000	Rp105.000.000	Rp138.872.000	Rp96.401.000
3	25	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp456.536.000	Rp517.105.500	Rp517.336.000	Rp359.346.100
3	25	4	2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp22.000.000	Rp22.000.000	Rp22.000.000	Rp8.600.000
3	25	4	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp123.635.000	Rp125.635.000	Rp158.205.000	Rp106.235.000
3	25	4	2.03	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp27.500.000	Rp27.500.000	Rp27.500.000	Rp6.345.000
3	25	4	2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp283.401.000	Rp341.970.500	Rp309.631.000	Rp238.166.100
3	25	5		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp84.877.600	Rp84.882.000	Rp114.452.000	Rp74.613.600
3	25	5	2.01	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Rp84.877.600	Rp84.882.000	Rp114.452.000	Rp74.613.600
3	25	6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp142.249.500	Rp142.249.500	Rp152.234.500	Rp113.032.500
3	25	6	2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp22.663.000	Rp22.663.000	Rp22.663.000	Rp11.398.000
3	25	6	2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp74.818.500	Rp74.818.500	Rp84.803.500	Rp67.911.500
3	25	6	2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp44.768.000	Rp44.768.000	Rp44.768.000	Rp33.723.000



C. Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahunan. Tujuan perangkat daerah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan tujuan dan sasaran RPD serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan PD yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Tahun 2023 - 2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Target Kinerja berikut indikator dan target Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.7

Target Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat

Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja Tahun 2025	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,98	79,98



Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	25 Dokumen	25 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun	Jumlah DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun	12 Laporan	12 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	4 Dukumen	4 Dukumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur	Jumlah Aparatur	30 Orang	30 Orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	1 laporan	1 Laporan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Jumlah Laporan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen



Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawain perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawain perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Formal	3 orang	0 orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	2 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU yang disediakan	Jumlah SKHU yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Laporan	12 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Laporan	12 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	7 unit	0 Unit
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Jumlah Mebeleur yang diadakan	7 Unit	0 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian	3 sub organisasi	3 sub organisasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Jumlah surat masuk dan surat keluar	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon, air, listrik dan yang dibayar	Jumlah rekening telpon, air, listrik dan yang dibayar	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah, Jumlah PTT Tenaga Administrasi	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah, Jumlah PTT Tenaga Administrasi	12 Laporan	12 Laporan



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Negara yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Negara yang dipelihara	19 Unit	19 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil dan Motor Dinas yang dibayar pakak	Jumlah Mobil dan Motor Dinas yang dibayar pakak	19 Unit	19 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Unit	5 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit	3 Unit
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi tangkap	Persentase peningkatan produksi tangkap	1,5%	1,9%
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan	Jumlah laporan	3 laporan	3 laporan
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	5 Dokumen	5 Dokumen
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	2 Unit	2 Unit
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	60 Unit	60 Unit
Pembedayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya dan menerima bantuan	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya dan menerima bantuan	12 Kali	12 Kali
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat dan menerima bantuan	Jumlah nelayan kecil yang meningkat dan menerima bantuan	60 orang	60 orang
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelaya Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	12 kelompok	12 kelompok



PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi Budidaya	Persentase peningkatan produksi Budidaya	1,5%	1,5%
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah surat rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi, Pembinaan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi, Pembinaan dan Pelatihan	14 Kelompok	14 Kelompok
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	4 Kelompok	4 Kelompok
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok	Jumlah kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok	Jumlah kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok	Jumlah kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok



Penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	550 Rekomendasi	550 Rekomendasi
Pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Rekomendasi	550 Rekomendasi
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Lokasi pengelolaan pembudidayaan ikan	Lokasi pengelolaan pembudidayaan ikan	15 Kecamatan	15 Kecamatan
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Budidaya	Jumlah Prasarana Budidaya	2 Unit	2 Unit
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43 Unit	43 Unit
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	34 Orang	34 Orang
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%	10%



Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
Pengawasan Usaha Pembudidayaan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	33 pelaku usaha	33 pelaku usaha
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan dan pemasaran hasil perikanan	10%	10%
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	5 Dokumen	5 DOkumen
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran	5 Dokumen	5 DOkumen
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha



Dinas Perikanan

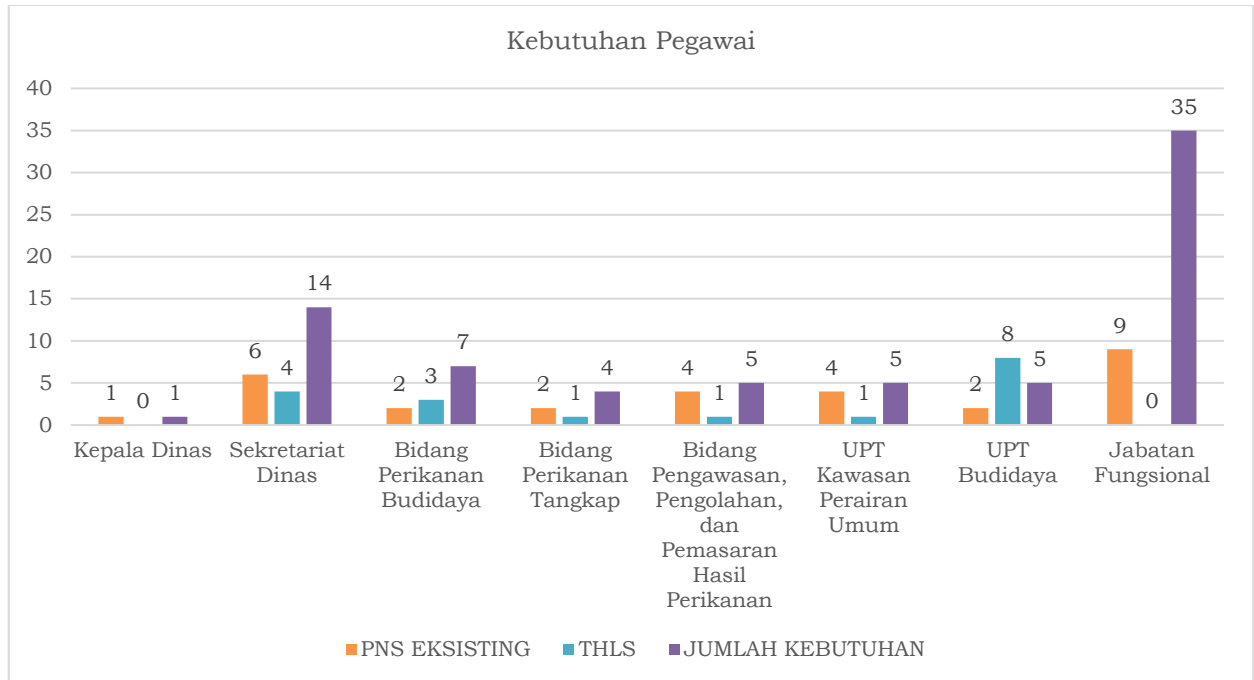
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	9 Pelaku USaha	9 Pelaku USaha
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	7 Pelaku USaha	7 Pelaku USaha



BAB III KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut :



Sumber: diolah Tim Anjab Dinas Perikanan, 2025.

Berdasarkan pada gambar diatas terlihat bahwa kinerja 76 pegawai sesuai jumlah kebutuhan pegawai Dinas Perikanan bisa ditangani oleh 30 pegawai ditambah dengan 18 tenaga kontrak kategori B sesuai kondisi yang ada. Tenaga kontrak tipe B merupakan Tenaga Kontrak yang memiliki tugas melaksanakan sebagian ketugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah.

Dalam hal sarana dan prasarana di Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat memiliki aset yang dirinci sebagai berikut:



B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana mobilitas yang dimiliki oleh Dinas Perikanan sebagai berikut :

1. Kendaraan Roda 4	: 4 Unit
2. Kendaraan Roda 2	: 15 Unit
3. Komputer	: 3 Buah
4. Laptop	: 13 Buah
5. LCD Proyektor	: 2 Buah
6. Telepone	: 1 Buah
7. Faximel	: 1 Buah
8. Brankas	: 4 Buah
9. Mesin Tik	: 2 Buah
10. Lemari Kayu	: 11 Buah
11. Lemari Besi	: 10 Buah
12. Filling Kabinet	: 9 Buah
13. Sofa Tamu	: 3 Buah
14. Printer	: 7 Buah
15. Meja kantor	: 43 Buah
16. Kursi lipat	: 176 Buah
17. Kamera DLSR	: 2 Buah
18. Kamera poket	: 2 Buah

Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

- Gedung Kantor
- Balai Benih Ikan (BBI) Sumberjaya
- Gedung Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan
- Gedung UPP Sumberjaya
- Gedung UPP Pagar Dewa
- Pondok Wisata Pekon Kagungan
- Pondok Wisata Pekon Sukabanjar
- Gedung Poskeskan Lumbok Seminung.

**C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025****TABEL 3.1****REKAPITULASI ANGGARAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025**

REKAPITULASI ANGGARAN DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2025		
3.25.0.00.0.00.18.0000	Dinas Perikanan	Rp4.287.616.641,00
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp4.287.616.641,00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.538.713.441,00
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp60.612.000,00
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp29.246.000,00
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp4.926.000,00
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp4.385.000,00
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Rp4.395.000,00
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp4.380.000,00
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp4.390.000,00
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp8.890.000,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.014.237.941,00
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.002.230.541,00
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp4.360.000,00
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp4.395.000,00
3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp3.252.400,00
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp8.340.000,00
3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp8.340.000,00
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp19.875.000,00
3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp19.875.000,00
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp70.075.600,00
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.245.000,00
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp24.616.600,00
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp6.480.000,00
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp8.491.000,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp26.243.000,00
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0,00
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp146.621.900,00
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.400.000,00
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp35.000.000,00
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp109.221.900,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp218.951.000,00
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp153.800.000,00
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp5.151.000,00
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp60.000.000,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp201.911.000,00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp105.510.000,00
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp18.675.000,00
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp29.310.000,00



Dinas Perikanan

3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp57.525.000,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp96.401.000,00
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp40.898.000,00
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Rp55.503.000,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp359.346.100,00
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.600.000,00
3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rp8.600.000,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp106.235.000,00
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp30.900.000,00
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp29.100.000,00
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Rp28.100.000,00
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp18.135.000,00
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.345.000,00
3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.345.000,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp238.166.100,00
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.300.000,00
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.230.000,00
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp21.561.300,00
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp181.100.000,00
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Rp10.974.800,00
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp74.613.600,00
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Rp74.613.600,00
3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Rp14.438.600,00
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Rp60.175.000,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp113.032.500,00
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp11.398.000,00
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Rp11.398.000,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp67.911.500,00
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Rp67.911.500,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp33.723.000,00
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp33.723.000,00



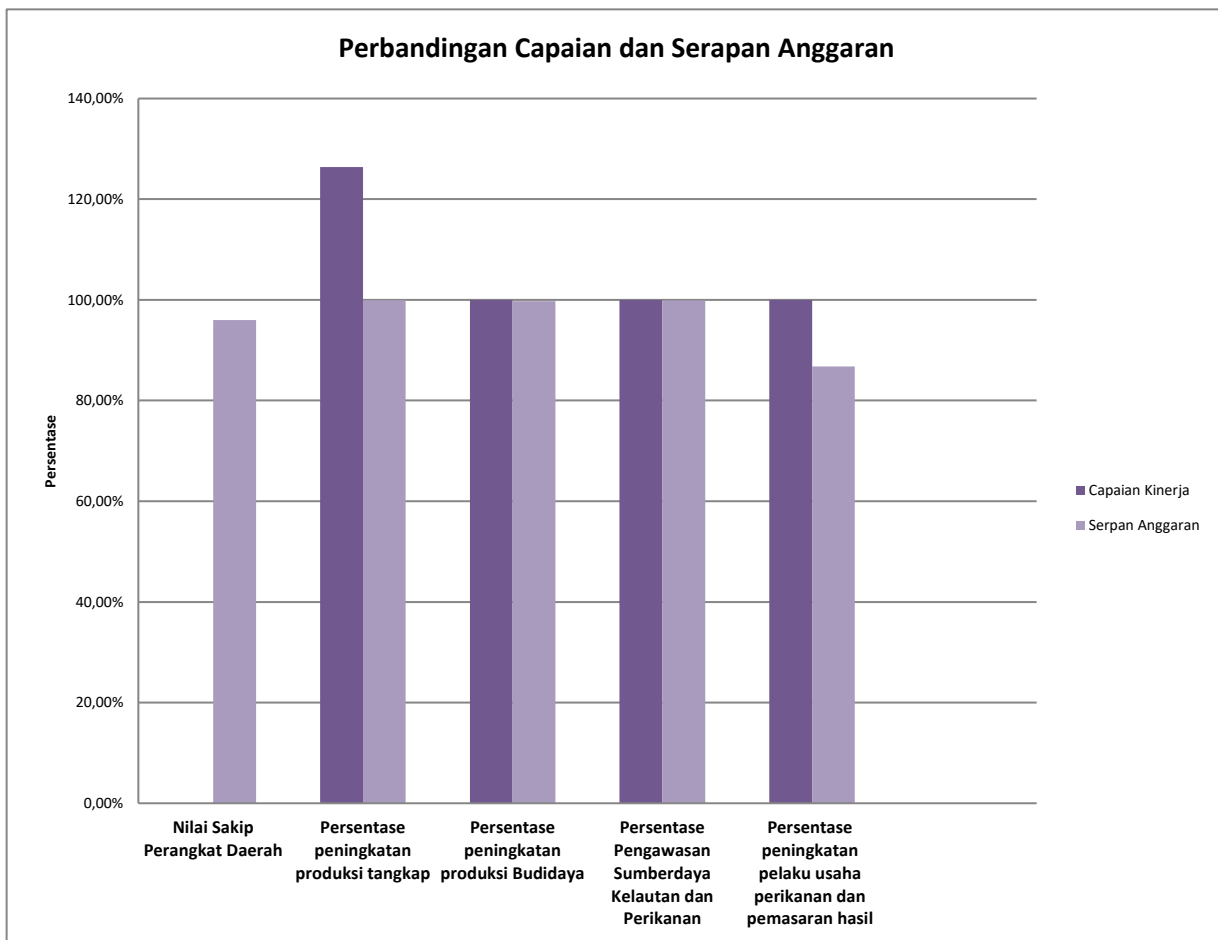
Tabel. 3.2
Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran dan Sumber Daya

No	Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Produksi Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	96,00%	-
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi tangkap	126,40%	99,96%	26,44%
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi Budidaya	100,01%	99,74%	0,27%
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	100,00%	99,87%	0,13%
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan dan pemasaran hasil perikanan	100,00%	86,74%	13,26%
Jumlah Total Efisiensi						40,10%
Rata-rata efisiensi per indikator						10,03%

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan program kegiatan namun 1 program belum dapat dievaluasi karena masih menunggu evaluasi dari Inspektorat Lampung Barat sehingga yang telah dievaluasi baru 4 program dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat pencapaian indikator rata-rata 110,38%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, total efisiensi anggaran mencapai **40,10%**



persen dengan rata-rata per Indikator sasaran **10,03%** persen. Sebagai gambaran lebih jelasnya disampaikan grafis sebagai berikut:





BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tindak Lanjut LHE Internal 2025

NO	REKOMENDASI LHE 2025	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROG PENYELESAI
1.	Memastikan seluruh dokumen SAKIP telah diformalkan yakni, di tandatangani, distempel, diberi nomor dan diberi tanggal penerbitan	Melakukan penelaahan ulang seluruh dokumen SAKIP (Renstra, Renja, DPA, RKA, PK, LKjIP, dan dokumen pendukung lainnya), kemudian memformalkan dengan tanda tangan pimpinan, cap/stempel, penomoran, serta penanggalan resmi.	Seluruh dokumen SAKIP yang telah di evaluasi	Bulan Juli Tahun 2025	Sekretaris Dinas, Kasubbag Umum dan Perencanaan	Sudah diproses, verifikasi final dokumen.
2.	Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah secara spesifik pada LKjIP	Melakukan review dan penyesuaian LKjIP dengan menambahkan analisis perbandingan capaian kinerja tahunan terhadap target Renstra (jangka menengah), disertai tabel dan penjelasan naratif.	LKjIP tahun 2024 memuat informasi perbandingan capaian dengan target Renstra	Bulan Juli Tahun 2025	Kasubbag Umum dan Perencanaan, dibantu Staf Penyusun LKjIP	Sudah diproses te selesai perbaikan LKjIP tahu 2024.

Berdasarkan Rekomendasi LHE Tahun 2025, telah dilakukan tindak lanjut berupa penelaahan ulang seluruh dokumen SAKIP, meliputi Renstra, Renja, DPA, RKA, PK, LKjIP, serta dokumen pendukung lainnya, untuk memastikan seluruh dokumen telah diformalkan dengan tanda tangan pimpinan, cap/stempel, penomoran, dan penanggalan resmi, dengan target seluruh dokumen yang telah dievaluasi dan pelaksanaan pada bulan Juli 2025 oleh Sekretaris Dinas serta Kasubbag Umum dan Perencanaan, dan saat ini telah diproses serta dalam tahap verifikasi final dokumen. Selain itu, telah dilakukan review dan penyesuaian LKjIP dengan menambahkan analisis perbandingan capaian kinerja tahun berjalan terhadap target Renstra jangka menengah yang disertai tabel dan penjelasan naratif, sehingga LKjIP Tahun 2024 memuat informasi perbandingan capaian dengan target Renstra, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2025 oleh Kasubbag Umum dan Perencanaan dibantu Staf Penyusun LKjIP, dan telah diproses serta selesai perbaikan LKjIP Tahun 2024.

B. Capaian Kinerja

Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Lampung Barat Nomor: 523/704/III.11/2024 Tahun 2025. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1,5	1,58	101,58

Perhitungan dari Persentase Peningkatan Produksi Perikanan dilakukan dengan menghitung peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya setiap tahun. Persentase peningkatan dihitung dengan $\frac{\text{Jumlah produksi tahun ini} - \text{Jumlah produksi tahun lalu}}{\text{Jumlah produksi tahun lalu}} \times 100$. Pada tahun 2025 untuk produksi perikanan tangkap sebesar 785,20 ton, meningkat 19 ton dibandingkan tahun 2024 (766,20 ton), dan untuk produksi perikanan budidaya tahun 2025 sebesar 10153,20 ton meningkat 150,8 ton dari tahun 2024 (10002,36 ton), dengan total produksi perikanan Kab. Lampung Barat tahun 2025 sebesar 10938,400 ton. Persentase peningkatan produksi dihitung dengan formulasi :

$$\text{Persentase peningkatan produksi 2025} = \left(\frac{10938,400 - 10768,560}{10768,560} \right) \times 100 = 1,58\%$$

Dalam upaya meningkatkan produksi perikanan, Dinas Perikanan pada bidang perikanan budidaya melaksanakan serangkaian kegiatan strategis yang terintegrasi kepada pembudidaya ikan kecil maupun kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN), meliputi Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis budidaya, Pelaksanaan Temu Usaha Perikanan Budidaya guna memperluas akses kemitraan, pembiayaan, dan pemasaran, Pelatihan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil untuk memperkuat tata kelola dan manajemen kelompok, serta Penyerahan Bantuan Benih Ikan sebagai dukungan langsung dalam meningkatkan kapasitas produksi;



melalui sinergi kegiatan tersebut diharapkan produktivitas dan efisiensi usaha budidaya meningkat sehingga target kenaikan produksi dapat tercapai sekaligus mendorong kesejahteraan pembudidaya ikan kecil secara berkelanjutan.

Pada bidang perikanan tangkap dalam menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap melakukan beberapa kegiatan yang ditujukan kepada nelayan maupun kelompok nelayan (KUB) antara lain Pembinaan Kelembagaan Kelompok Nelayan untuk memperkuat tata kelola dan kapasitas organisasi, pengembangan kapasitas nelayan kecil guna meningkatkan keterampilan dan efisiensi kegiatan penangkapan ikan, serta penjaminan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap melalui penyerahan bantuan berupa alat penangkapan ikan dan perahu penangkapan ikan.

Kegiatan penangkapan ikan di perairan umum darat masih menghadapi berbagai kendala teknis, terutama terbatasnya prasarana operasional berupa perahu tanpa motor (*non-motorized boat*) dengan kapasitas angkut dan stabilitas terbatas, sehingga jangkauan daerah penangkapan (*fishing ground*) sangat bergantung pada arus dan tenaga dayung serta membatasi mobilitas, durasi operasi, dan volume hasil tangkapan. Selain itu, keterbatasan keterampilan nelayan dalam merakit, memodifikasi, dan memperbaiki alat tangkap tradisional (jaring insang, bubu, pancing, dan sejenisnya) menyebabkan rendahnya efisiensi operasi dan tingginya potensi kehilangan alat (*gear loss*). Dari sisi budidaya perikanan di perairan umum darat, kendala teknis meliputi belum optimalnya penerapan manajemen kualitas air pada sistem keramba atau kolam sederhana (pengendalian DO, pH, suhu, dan beban organik), rendahnya efisiensi pemberian pakan serta konversi pakan (FCR), dan minimnya penerapan biosekuriti, yang secara keseluruhan berdampak pada produktivitas, tingkat kelangsungan hidup (SR), serta keberlanjutan usaha. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan ditujukan untuk mengatasi permasalahan di lingkup penangkapan ikan maupun budidaya ikan untuk meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Lampung Barat. Adapun kendala dari Dinas



Perikanan adalah jangkauan wilayah potensi yang luas sehingga tidak semua pelaku usaha dapat dijangkau untuk diberikan sosialisasi/pembinaan terkait pengembangan kapasitas baik itu nelayan maupun pembudidaya ikan dan fasilitasi sarana prasarana usaha perikanan.

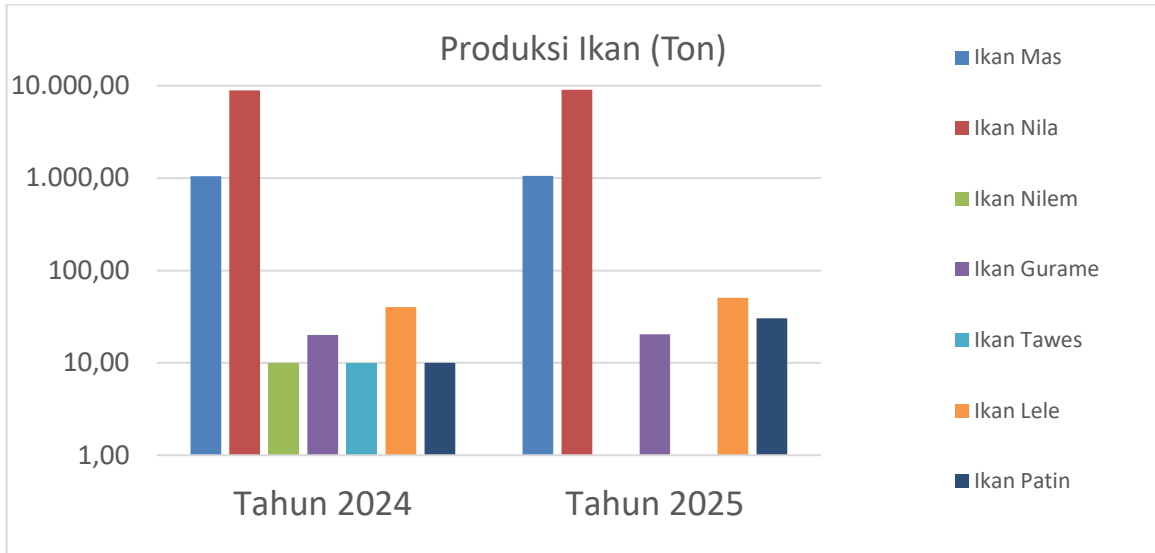
Salah satu potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Barat yaitu dengan adanya perikanan budidaya yang meliputi budidaya darat dan perairan umum serta penangkapan ikan di perairan umum yang tersebar di 15 kecamatan. Produksi kegiatan budidaya ikan yang meliputi budidaya ikan di kolam, budidaya di perairan umum Keramba Jaring Apung (KJA) dan mina padi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Produksi Jenis Ikan Air Tawar Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Ikan Mas	1.045,24	1.055,95
2.	Ikan Nila	8.866,67	8.995,91
3.	Ikan Nilem	10,05	0
4.	Ikan Gurame	20,10	20,31
5.	Ikan Tawes	10,05	0
6.	Ikan Lele	40,20	50,77
7.	Ikan Patin	10,05	30,46
Jumlah		10.002,36	10.153,40

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat

Diagram Produksi Ikan Air Tawar Kab. Lampung Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat

Dari data diatas produksi ikan nila sangat dominan lebih dari 88,59 % karena Lampung Barat konsen dengan budi daya ikan nila dan ikan mas yang banyak diminati yang secara kearifan lokal memang sudah dibudidayakan oleh masyarakat lokal. Sedangkan jenis ikan yang lain terbatas untuk konsumsi, dan secara budidaya kurang diminati.

Adapun potensi kegiatan penangkapan di perairan umum di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Potensi Kegiatan Penangkapan Ikan Perairan Umum
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	Volume	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Jumlah nelayan	1.833 orang	1.237 orang
2.	Jumlah armada :		
	- Perahu tanpa motor (jukung)	223 Unit	208 Unit
	- Perahu bermotor (tempel)	20 Unit	0 Unit
3.	Produksi Penangkapan	766,2 Ton	785,2Ton

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat, 2025.

Ditinjau dari Potensi lahan darat di Kabupaten Lampung Barat yang dapat dikembangkan untuk budidaya kolam seluas 5.584,00 Ha



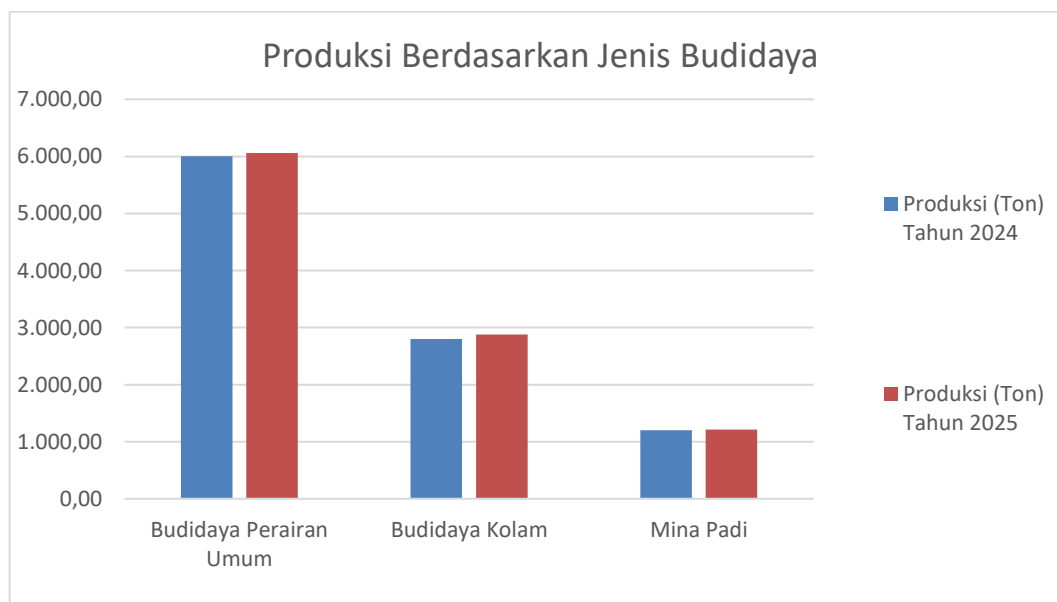
dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 2.429 Ha, sementara untuk budidaya mina padi potensi lahan 13.710 Ha dengan tingkat pemanfaatan 452 Ha. Potensi pengembangan perikanan budidaya di darat didominasi 3 (Tiga) kecamatan, yaitu Sumberjaya, Gedung Surian dan Kebun Tebu. Dari data diatas jumlah produksi ikan berdasarkan jenis budidaya dua tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 4.4
Produksi Ikan berdasarkan Jenis Budi Daya Kab Lampung Barat
Tahun 2023 dan Tahun 2025

No	Jenis Budidaya	Produksi (Ton)	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Budidaya Perairan Umum	6.001,42	6.061,58
2.	Budidaya Kolam	2.800,66	2.879,50
3.	Mina Padi	1.200,28	1.212,32
Jumlah		10.002,36	10.153,40

Sumber: Dinas Perikanan, 2025.

Diagram Produksi Ikan berdasarkan Jenis Budi Daya
Kab Lampung Barat
Tahun 2024 dan Tahun 2025



Sumber: Dinas Perikanan, 2025.

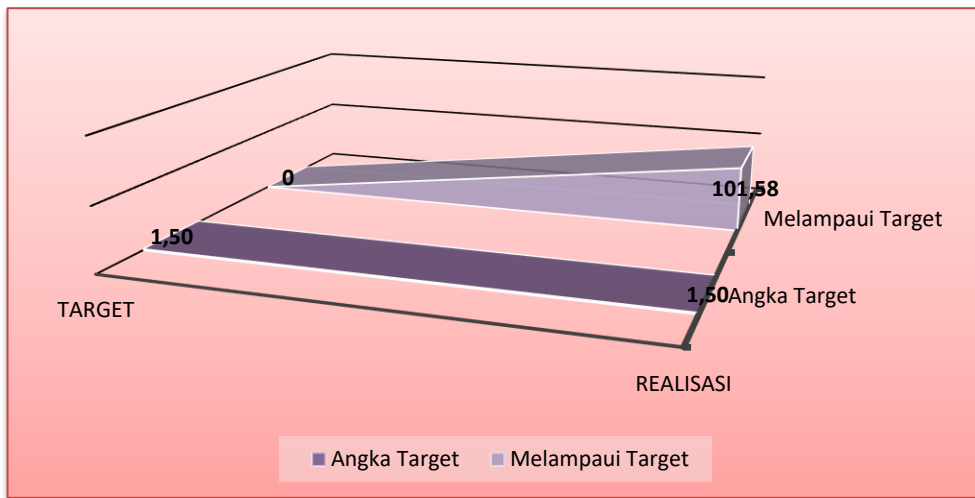
Untuk kegiatan penangkapan ikan di perairan umum di Kabupaten Lampung Barat meliputi perairan danau, sungai, waduk, rawa dan galian air lainnya (GAL). Potensi perairan umum di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi fokus untuk pengembangan



perikanan budidaya adalah Perairan Umum Danau Ranau dengan luas potensi 413 Ha yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung. Untuk pengembangan perikanan budidaya di perairan umum Danau Ranau difokuskan untuk pengembangan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang terletak di 3 (tiga) pekon/desa yaitu kagungan, sukabanjar dan tawan sukamulya. Hingga saat ini potensi perairan Danau Ranau yang dimanfaatkan baru mencapai 45 Ha dari potensi lahan yang bisa dikembangkan untuk budidaya KJA sebesar 413 Ha berdasarkan perencanaan zonasi Dinas Perikanan Lampung Barat. Hingga saat ini jumlah KJA yang ada di perairan umum Danau Ranau yaitu ± 466 (Empat ratus enam puluh enam) unit.

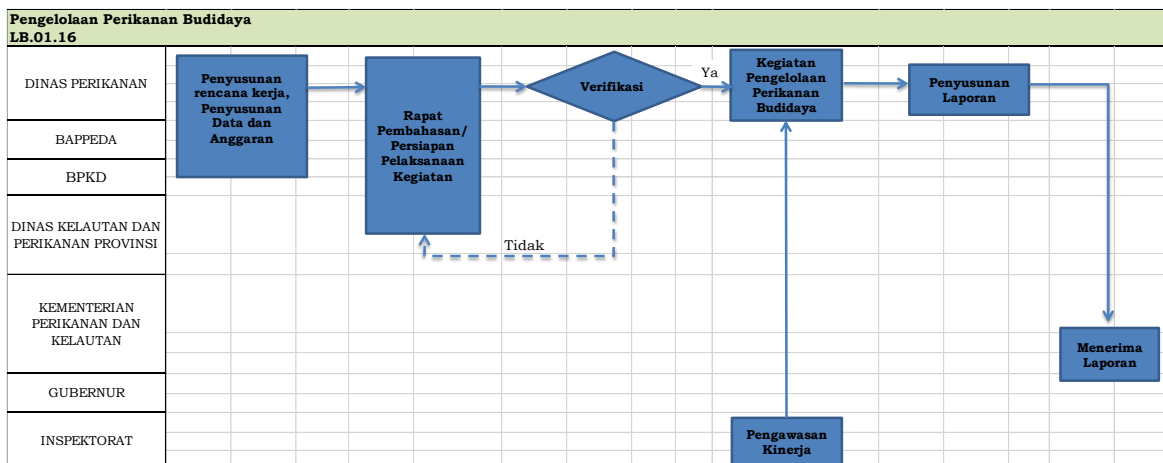
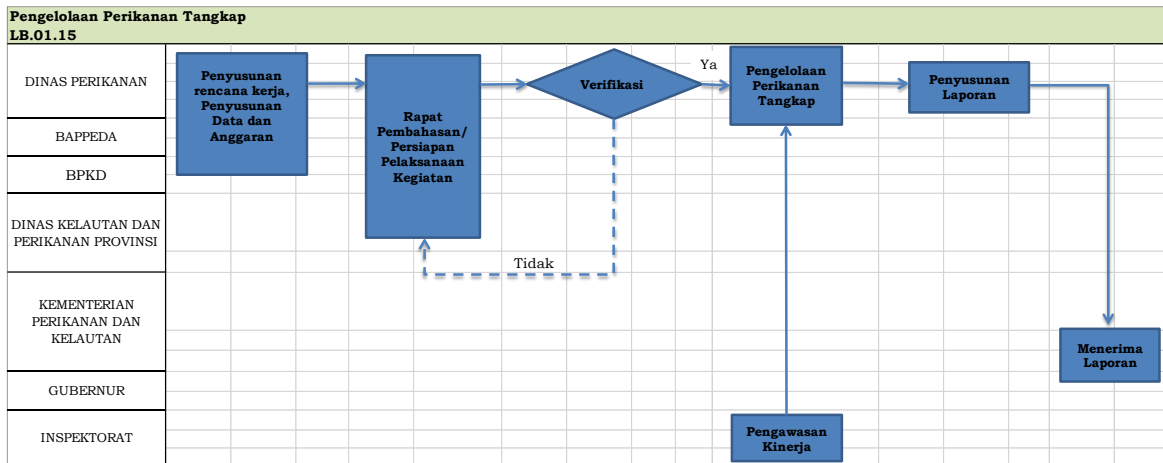
Dari tabel 4.1 terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai Produksi Perikanan, dengan capaian kinerja 101,58%. Capaian kinerja nyata indikator "Persentase peningkatan produksi perikanan" adalah sebesar 1,58% dari target sebesar 1,5% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,58%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Diagram Target dan Realisasi capaian Produksi perikanan Tahun 2025



Berdasarkan diagram diatas capaian kinerja sasaran Meningkatnya nilai produksi perikanan di Kabupaten Lampung Barat melampaui 0,08% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1.5% Pencapaian ini melampaui target produksi perikanan.

Diagram Peta Proses Bisnis Dinas Perikanan





Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat tidak lepas dari keterkaitan dengan berbagai perangkat daerah di Kabupaten Lampung Barat terutama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat. Serta dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan juga organisasi vertikal Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti yang dapat dijelaskan di Peta Proses Bisnis diatas.

Selain itu Dinas Perikanan juga berkaitan dengan organisasi atau badan non pemerintahan seperti Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yaitu sebanyak 466 kelompok di Kab. Lampung Barat untuk bidang pengelolaan perikanan budidaya, dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk bidang pengelolaan perikanan tangkap sebanyak 36 Kelompok di Kabupaten Lampung Barat. Terdapat juga Petugas Penyuluh Perikanan yang berjumlah 7 (tujuh orang) baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), yang merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diperbantukan untuk urusan penyuluhan perikanan di Kabupaten Lampung Barat. Penyuluh perikanan tersebut berperan sebagai pendamping teknis dan fasilitator program, memberikan pelatihan inovasi budidaya, membantu pencatatan usaha dan analisis kelayakan, serta menjembatani akses bantuan dan pembiayaan sehingga tercipta sinergi yang mendorong peningkatan produksi, efisiensi usaha, dan kesejahteraan pembudidaya secara berkelanjutan.





Gambar 4.1 Dokumentasi Kegiatan Perikanan Tahun 2025



C. Perbandingan Kinerja

1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun 2024

Tahun 2025 adalah tahun ke 3 pelaksanaan renstra Dinas Perikanan, untuk mencapai "Meningkatnya nilai produksi perikanan". Realisasi tahun ini sudah mampu mencapai sebesar 1,58%. Meningkatnya Produksi perikanan dikarenakan adanya peningkatan Jumlah Produksi Perikanan terutama pada produksi Perikanan Tangkap, Produksi usaha perikanan meliputi kegiatan penangkapan perairan umum dan kegiatan usaha budidaya ikan. Bila dilihat dari Produksi penangkapan ikan pada tahun 2025 sebesar 785,2 ton atau 126,40% dari target produksi pada tahun 2024 sebesar 766,2 ton. Produksi usaha budidaya ikan tahun 2025 sebesar 10.002,36 ton atau mencapai 100,01% dari target yang ditetapkan. Produksi benih ikan tahun 2025 sebesar 67.692.202 ekor atau mencapai 108,01% dari target yang ditetapkan 62.669.250 ekor.

2. Perbandingan Kinerja dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Pada Tahun 2025 ini capaian indikator kinerja dari Pemerintah Provinsi Lampung yaitu sebesar 368.460,62 ton (total produksi perikanan Provinsi Lampung). Perbandingan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi	
		Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Barat
1.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	197.826,67	785,20
2.	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	170.633,95	10.153,40
Jumlah		368.460,62	10.938,60



3. Perbandingan Kinerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dengan indikator "Persentase peningkatan produksi perikanan" terealisasi sebesar 1,58% dari target sebesar 1,5% atau dapat dijabarkan produksi perikanan baik budidaya maupun tangkap sebesar 10.938,60 ton di tahun 2025, jika disandingkan dengan Indikator Kinerja Utama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2025 yakni Produksi Perikanan Nasional (Budidaya dan Tangkap) dengan proyeksi nasional sebesar 13,02 juta ton (belum bisa menampilkan rilis resmi Produksi Tahun 2025 dikarenakan masih menunggu proses validasi data Statistik Perikanan Budidaya dan Tangkap Semester II).

4. *Benchmarking*

Pembandingan capaian kinerja Dinas Perikanan tahun 2025 menetapkan total produksi perikanan tingkat Provinsi Lampung. Perbandingan capaian jumlah produksinya memang jauh, 10.938,6 ton capaian Kabupaten Lampung Barat berbanding dengan 368.460,62 ton total produksi perikanan Provinsi Lampung.

Namun, hal ini wajar terjadi mengingat kurang lebih 40% wilayah Provinsi Lampung merupakan area perairan (<https://pik.fp.unila.ac.id/>) yang tentu saja potensial untuk dikelola menjadi sumber produksi perikanan. Sementara Kabupaten Lampung Barat didominasi wilayah kawasan hutan yang tidak boleh dikelola baik untuk permukiman atau lahan pertanian warga. Lampung Barat juga tidak ada perairan laut, sehingga potensi pengelolaan dan produksi perikanan memanfaatkan perairan danau ranau dan perairan buatan berupa kolam yang biasanya dibuat manual di sekitar pekarangan rumah masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut patut menjadi pertimbangan bahwa meski capaian kinerja produksi perikanan Lampung Barat lebih rendah dari total produksi Provinsi Lampung, namun dengan kondisi perairan yang berbeda signifikan tersebut, Lampung Barat cukup sukses dan berhasil meningkatkan produksi perikanan. Minimal memenuhi kebutuhan ketersediaan konsumsi masyarakat dalam Kabupaten Lampung Barat, sebelum dijadikan komoditas jual ke luar daerah dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Capaian kinerja yang melebihi target



sampai 101,53% menunjukkan bahwa pemerintah bersama dengan masyarakat telah berupaya memaksimalkan potensi perairan yang ada untuk dapat dikelola maksimal sehingga produksi perikanan dapat terus dilakukan dan bertambah sehingga kecukupan pangan sektor perikanan terpenuhi.



C. Realisasi Anggaran

Tabel. 4.6
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Kinerja				Keuangan			Ket.
				Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Meningkatnya Produksi Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	%	79,98			3.538.713.441,-	3.397.136.540,-	96,32	-
		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah capaian Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	25	25	100	60.612.000,-	60.608.000,-	99,99	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	Dokumen	4	4	100	3.014.237.941,-	2.889.185.703,-	95,85	-



Dinas Perikanan

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1	100	8.340.000,-	8.340.000,-	100	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	1	100	19.875.000,-	19.655.000,-	98,89	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	Paket	1	1	100	70.075.600,-	70.075.600,-	100	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	7	0	100	0,-	0,-	0	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian	sub organisasi	3	3	100	146.621.900,-	134.600.586,-	91,80	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	19	19	100	218.951.000,-	214.671.651,-	98,05	-
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi tangkap	%	1,5	1,9	126,4	201.911.000,-	201.826.000,-	99,92	-



Dinas Perikanan

		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya dan menerima bantuan	Laporan	3	3	100	105.510.000,-	105.425.000,-	99,92	-
		Pembedayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya dan menerima bantuan	Kali	12	12	100	96.401.000,-	96.401.000,-	100	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi Budidaya	%	1.5	1.5	100	359.346.100,-	358.406.980,-	99,74	-
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Rekomendasi	30	30	100	8.600.000,-	8.600.000,-	100	-
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi, Pembinaan dan Pelatihan	Kelompok	14	14	100	106.235.000,-	106.235.000,-	100	



Dinas Perikanan

		Penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	Rekomendasi	550	550	100	6.345.000,-	6.345.000,-	100	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Lokasi pengelolaan pembudidayaan ikan	Kecamatan	15	15	100	238.166.100,-	237.226.980,-	99,61	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	%	10	10	100	74.613.600,-	74.513.600,-	99,87	-
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100	74.613.600,-	74.513.600,-	99,87	-
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan dan pemasaran hasil perikanan	%	10	10	100	113.032.500,-	98.050.000,-	86,74	-
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Dokumen	5	5	100	11.398.000,-	11.398.000,-	100	-



Dinas Perikanan

		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Unit Usaha	115	115	100	67.911.500,-	52.929.000,-	77,94	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	9	9	100	33.723.000,-	33.723.000,-	100	

Sumber: Dokumen Perencanaan Dinas Perikanan, 2025.



D. Pemanfaatan Laporan Kinerja

1. Evaluasi Capaian Program dan Target Kinerja, untuk menilai seberapa jauh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Laporan kinerja berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban publik terkait penggunaan anggaran dan hasil kerja dinas.
3. Dasar Perbaikan Perencanaan dan Kebijakan, Data dan analisis dalam laporan kinerja menjadi dasar bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan, prioritas program, alokasi anggaran, dan penyusunan strategi baru di tahun berikutnya agar lebih efektif dan efisien.
4. Bahan Laporan kinerja dibuat untuk mempermudah manajemen dalam melakukan pengendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien dan bermanfaat pada kegiatan operasional perusahaan.
5. Laporan kinerja merupakan bukti dan wujud pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang sudah dilakukan selama waktu yang sudah ditentukan.



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Dalam tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,58%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini merupakan kerja keras bersama lintas instansi melalui serangkaian kegiatan strategis dari Dinas Perikanan meliputi Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil, Pelaksanaan Temu Usaha Perikanan Budidaya, Pelatihan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil, Penyerahan Bantuan Benih, Pembinaan Kelembagaan Kelompok Nelayan, Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.287.616.641,- (Empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) teralisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp.4.129.933.120,- (Empat milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu



seratus dua puluh rupiah) atau 96,32 Persen, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp.157.683.521,-

B. Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya ikan seperti benih ikan bagi pembudidaya ikan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat;
2. Bantuan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan seperti perahu, jaring, dan Jala dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat;
3. Pelatihan dan pembinaan bagi pembudidaya ikan dan nelayan;
4. Kemauan untuk terlibat dan berperan aktif masyarakat dalam setiap program dan kegiatan Dinas Perikanan untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

C. Permasalahan

1. Harga Pakan Tinggi dan sulitnya pemasaran;
2. Penangkapan ikan di perairan Danau Ranau Kecamatan Lumbok Seminung juga belum mengalami kenaikan secara signifikan;
3. Faktor cuaca sehingga hasil penangkapan sedikit.

D. Rekomendasi dan tindak lanjut

1. UPT Kawasan Perairan Umum untuk melaksanakan pengecekan kualitas air secara berkala dan hasilnya disampaikan ke pembudidaya ikan KJA;
2. Terus menghimbau kepada pembudidaya ikan untuk setiap pembudidaya memiliki aerator minimal 8 titik per 1 unit KJA (14m x 14m) dengan kapasitas aerator 100 watt.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat, 24 Februari 2026



KAMALUDIN, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19600405 198903 1 007